

Kemiskinan di Indonesia: Analisis penyebab, dampak, dan solusi kebijakan

Najwa Elok Khairiroh

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail : 230102110067@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Kemiskinan, penyebab, dampak, solusi, kebijakan

Keywords:

Poverty, causes, impacts, policy, solutions

ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia, meskipun telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun angka kemiskinan telah berkurang secara bertahap, masih ada jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah terpencil. Ketimpangan antar wilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia serta beberapa faktor yang saling berkaitan dan memperparah kemiskinan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor-

faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, dampaknya terhadap masyarakat, dan solusi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. diharapkan angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan secara signifikan dalam jangka panjang dan secara merata sampai pada tempat-tempat yang terpececil.

ABSTRACT

Poverty remains one of the biggest challenges faced by Indonesia, despite experiencing significant economic growth over the past few decades. Although the poverty rate has gradually decreased, millions of people still live below the poverty line, especially in remote areas. Regional disparities, low quality of human resources, and several interrelated factors continue to exacerbate poverty. This article aims to examine the underlying causes of poverty in Indonesia, its impacts on society, and policy solutions that can be implemented to address the issue. It is hoped that poverty in Indonesia can be significantly reduced in the long term and in a more equitable manner, reaching even the most remote areas.

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan terus menjadi perhatian pemerintah, tidak hanya akhir-akhir ini, namun sejak berdirinya negara. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Program pembangunan saat ini selalu menekankan pada upaya pengentasan kemiskinan. Padahal, pembangunan tersebut sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan hingga saat ini (Syadullah, 2010).

Definisi kemiskinan sendiri sangat beragam, mulai dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar konsumen hingga kurangnya peluang usaha. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih luas yang mencakup aspek sosial dan moral (Sholch 2010). Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang atau barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan terjadi ketika pendapatan suatu masyarakat berada di bawah ambang batas kemiskinan tertentu (Kurniawan 2004). Kemiskinan juga berarti kurangnya kebutuhan, ketergantungan sosial, serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang bermartabat dalam masyarakat. Menurut Uni Eropa, definisi lain yang umum digunakan yaitu kemiskinan adalah kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan sumber daya (materi, sosial, budaya).

Masalah kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang saja, negara-negara maju juga tidak bisa lepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada tingkat terjadinya kemiskinan serta tingkat kesulitan untuk mengatasinya yang bergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara tersebut. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin sulit untuk mengatasinya. Negara maju memiliki angka kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan negara berkembang. Namun, permasalahan ini bukan hanya menjadi permasalahan internal satu negara saja melainkan sudah menjadi permasalahan negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pembahasan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka untuk bertahan hidup dan berkembang. Hak-hak dasar masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan perempuan dan laki-laki di bidang gizi (pangan), kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, perlindungan dari ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, untuk wanita dan pria. Memahami konsep kemiskinan tidaklah mudah. Sebab, memahami konsep kemiskinan tidaklah mudah.

Penyebab Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka untuk bertahan hidup dan berkembang. Hak-hak dasar masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan perempuan dan laki-laki di bidang gizi (pangan), kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, perlindungan dari ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, untuk wanita dan pria. Memahami konsep kemiskinan tidaklah mudah. Sebab, memahami konsep kemiskinan tidaklah mudah (Khomsan et al., 2015).

Akibat dari ketidakmerataan ini, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar yang vital untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini termasuk akses terhadap jalan yang layak, yang sangat penting untuk mobilitas dan distribusi barang. Tanpa jalan yang baik, masyarakat di daerah terpencil sulit untuk mengakses pasar dan mendapatkan pemasukan yang lebih baik. Selain itu, akses terhadap listrik juga sangat terbatas, yang mengakibatkan banyak rumah tangga tidak dapat menikmati fasilitas modern yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kondisi air bersih juga menjadi masalah serius di banyak daerah yang terabaikan. Tanpa akses ke air bersih, kesehatan masyarakat terancam, dan risiko penyakit menular menjadi lebih tinggi. Selain itu, layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas juga sering kali tidak tersedia di daerah-daerah tersebut. Sekolah-sekolah mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai, serta kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas.

Akibatnya, anak-anak di daerah terpencil kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, yang berpotensi menghambat kemajuan mereka di masa depan.

Di sisi lain, ketidakmerataan pembangunan juga menyebabkan pergeseran sosial yang signifikan. Masyarakat yang tinggal di daerah yang lebih berkembang sering kali memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mereka dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan memiliki akses ke berbagai layanan yang tidak tersedia di daerah terpencil. Sebaliknya, masyarakat di daerah yang kurang berkembang terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena mereka tidak memiliki sumber daya dan peluang yang sama.

Ketidakmerataan pembangunan ini tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga memicu ketidakpuasan sosial. Masyarakat yang merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah mungkin akan merasa frustrasi dan kehilangan harapan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya yang lebih besar dalam menciptakan pembangunan yang merata dan inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi dan sosial yang terjadi di negara ini.

Kedua, pengangguran dan pekerjaan di sektor informal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Banyak masyarakat yang terjebak dalam sektor informal, seperti pedagang kaki lima, buruh tani, dan pengrajin kecil, yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan kerja yang memadai. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki gaji yang layak, yang membuat kondisi ekonomi mereka tetap rentan. Selain itu, akses mereka terhadap jaminan sosial sangat terbatas, sehingga ketika menghadapi risiko seperti sakit atau kecelakaan kerja, mereka tidak memiliki jaring pengaman yang dapat diandalkan.

Pengangguran dan pekerjaan di sektor informal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Banyak masyarakat yang terjebak dalam sektor informal, seperti pedagang kaki lima, buruh tani, dan pengrajin kecil, yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan kerja yang memadai. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki gaji yang layak, yang membuat kondisi ekonomi mereka tetap rentan. Selain itu, akses mereka terhadap jaminan sosial sangat terbatas, sehingga ketika menghadapi risiko seperti sakit atau kecelakaan kerja, mereka tidak memiliki jaring pengaman yang dapat diandalkan.

Keberadaan sektor informal ini sering kali menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat yang tidak memiliki alternatif pekerjaan yang lebih baik. Meskipun mereka bekerja keras, pendapatan yang dihasilkan dari sektor ini sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana keluarga-keluarga terjebak dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Selain itu, rendahnya keterampilan dan pendidikan di kalangan masyarakat miskin semakin memperburuk situasi. Banyak dari mereka tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, sehingga keterampilan yang mereka miliki tidak memadai untuk

bersaing di pasar tenaga kerja formal. Dalam era di mana persaingan di dunia kerja semakin ketat dan banyak perusahaan mencari tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi, mereka yang berasal dari latar belakang miskin menjadi semakin tertinggal. Keterbatasan ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi, sehingga mereka terpaksa tetap bergantung pada pekerjaan di sektor informal.

Kondisi ini menciptakan tantangan besar dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Tanpa adanya peningkatan keterampilan dan akses pendidikan yang lebih baik, masyarakat yang bekerja di sektor informal akan terus mengalami kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan program yang dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dan memperoleh pekerjaan yang layak serta berkelanjutan.

Ketiga, kurangnya akses terhadap pendidikan juga memperburuk masalah kemiskinan. Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar yang efektif untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, namun kenyataannya, banyak keluarga miskin yang merasa pendidikan tidak terjangkau. Banyak anak-anak dari keluarga yang ekonominya lemah terpaksa putus sekolah lebih awal karena keterbatasan biaya. Mereka sering kali harus membantu orang tua mereka mencari nafkah, sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, karena tanpa pendidikan yang memadai, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sangat terbatas.

Selain itu, kualitas pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pendidikan di kota-kota besar. Sekolah-sekolah di daerah tersebut sering kali kekurangan fasilitas yang memadai, seperti buku pelajaran, laboratorium, dan akses internet. Ketersediaan guru yang berkualitas juga menjadi masalah, di mana banyak sekolah di daerah terpencil kesulitan untuk menarik tenaga pengajar yang kompeten. Hal ini menyebabkan anak-anak di daerah tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang seharusnya dapat membuka pintu bagi mereka untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup.

Kondisi ini semakin diperparah oleh kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah tersebut tidak memiliki fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang layak, sanitasi yang baik, dan lingkungan belajar yang aman. Tanpa lingkungan yang kondusif untuk belajar, minat anak-anak untuk bersekolah pun dapat menurun. Akibatnya, kita melihat angka putus sekolah yang tinggi di daerah-daerah tersebut, yang selanjutnya berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan.

Ketidakadilan dalam akses pendidikan ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara masyarakat di kota dan di desa. Sementara anak-anak di kota-kota besar memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, anak-anak di daerah terpencil sering kali terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa pendidikan yang mereka terima tidak sebanding. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada

perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa generasi muda yang terdidik dan terampil, masa depan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia akan terancam.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan. Program beasiswa, pelatihan bagi guru, dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hanya dengan cara ini, kita dapat berharap untuk memutus siklus kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Keempat, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia. Akses yang baik terhadap layanan kesehatan sangat penting untuk menjaga kesehatan individu serta meningkatkan produktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil dan kurang berkembang, tidak memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini sering kali disebabkan oleh jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, minimnya transportasi, serta kurangnya informasi tentang layanan kesehatan yang tersedia.

Di banyak daerah, puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat sering kali kekurangan fasilitas dasar dan tenaga medis yang memadai. Dalam situasi darurat, masyarakat mungkin harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Selain itu, biaya untuk mendapatkan perawatan kesehatan juga menjadi kendala besar. Banyak keluarga miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan, sehingga mereka terpaksa mengabaikan masalah kesehatan yang seharusnya ditangani. Akibatnya, penyakit yang seharusnya dapat diobati menjadi semakin parah, dan ini berkontribusi pada penurunan kualitas hidup.

Kondisi ini juga menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Ketika individu sakit dan tidak dapat bekerja, pendapatan keluarga akan berkurang, yang selanjutnya membuat mereka semakin terjebak dalam kemiskinan. Selain itu, anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang baik berisiko mengalami masalah pertumbuhan dan perkembangan, yang dapat berdampak negatif pada pendidikan dan masa depan mereka. Tanpa perhatian yang tepat terhadap kesehatan, generasi mendatang akan terus menghadapi tantangan yang sama, sehingga memperpanjang siklus kemiskinan.

Pentingnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani. Program-program yang menasar kelompok rentan, seperti subsidi untuk biaya kesehatan atau peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, sangat diperlukan. Selain itu, edukasi tentang kesehatan

juga harus diperkuat agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencari perawatan yang tepat waktu.

Dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, kita tidak hanya membantu individu untuk hidup lebih sehat tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, baik melalui program bantuan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Arfiani, 2020). Faktor lain yang turut berperan adalah kebijakan ekonomi dan sosial yang belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), distribusi bantuan sering kali tidak tepat sasaran. Korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit juga menjadi hambatan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.

Dampak Kemiskinan Terhadap Masyarakat

Kemiskinan memiliki dampak yang luas dan mendalam, memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Salah satu dampak paling nyata dari kemiskinan adalah kesehatan yang buruk. Keluarga miskin sering kali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak, yang mengakibatkan tingginya angka kematian dan penyebaran penyakit. Ketidakmampuan untuk mendapatkan perawatan yang tepat membuat penyakit yang seharusnya dapat diobati menjadi fatal, dan kondisi kesehatan yang buruk ini juga berdampak pada produktivitas mereka dalam bekerja.

Dampak lain dari kemiskinan terlihat pada pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa putus sekolah lebih awal karena keterbatasan biaya atau kebutuhan untuk membantu keluarga. Tanpa pendidikan yang memadai, mereka kehilangan peluang untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Akibatnya, generasi mendatang terjebak dalam siklus kemiskinan yang sama, yang sulit diputus.

Kemiskinan juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Masyarakat yang terpinggirkan dan merasa tidak mendapatkan keadilan sering kali mengalami ketidakpuasan yang dapat memicu konflik dan kerusuhan. Ketidakadilan sosial ini menciptakan ketegangan antar kelompok, yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kemiskinan dapat memperburuk masalah kriminalitas, di mana individu yang merasa terdesak secara ekonomi mungkin terpaksa melakukan tindakan kriminal sebagai upaya untuk bertahan hidup.

Secara ekonomi, kemiskinan menghambat pertumbuhan dan pembangunan. Masyarakat yang miskin tidak memiliki daya beli yang cukup untuk mendukung perekonomian lokal. Ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur membuat mereka semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini juga berdampak pada potensi pertumbuhan ekonomi negara secara

keseluruhan, karena sumber daya manusia yang tidak terdidik dan tidak sehat tidak dapat berkontribusi secara maksimal pada perekonomian.

Terakhir, dampak psikologis dari kemiskinan juga sangat signifikan. Tekanan ekonomi yang dialami oleh keluarga miskin dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Rasa putus asa dan ketidakberdayaan dapat menghalangi individu untuk mengejar peluang yang lebih baik, menciptakan siklus yang menyulitkan mereka untuk keluar dari kondisi kemiskinan.

Secara keseluruhan, dampak kemiskinan sangat kompleks dan saling terkait, memerlukan pendekatan holistik dalam penanganannya. Mengatasi kemiskinan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi negara. Upaya yang konsisten dan terintegrasi dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berarti.

Solusi Kebijakan untuk Mengatasi Kemiskinan

Menangani masalah kemiskinan memerlukan pendekatan yang beragam dan fleksibel (Zaman, n.d.). Mengatasi kemiskinan di Indonesia memerlukan solusi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta reformasi dalam pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Pertama, meningkatkan akses terhadap pendidikan adalah langkah fundamental. Seperti yang disampaikan oleh (Zuhroh, 2009), sesungguhnya dalam menghadapi masalah kemiskinan pendidikan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua anak, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan bantuan biaya pendidikan dapat membantu mengurangi beban biaya bagi keluarga. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, seperti pembangunan sekolah dan pelatihan guru, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tersebut mendapatkan pendidikan yang memadai.

Kedua, pengembangan ekonomi berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat menciptakan program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Dukungan finansial, pelatihan, dan akses ke pasar dapat membantu masyarakat memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Selain itu, investasi dalam infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas transportasi, akan meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

Ketiga, reformasi dalam sistem pelayanan kesehatan juga sangat diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas tersedia dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Membangun lebih banyak fasilitas kesehatan di daerah terpencil serta meningkatkan pelatihan dan distribusi tenaga medis akan membantu mengatasi masalah akses. Selain itu, program jaminan kesehatan nasional yang komprehensif perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga mereka tidak terpaksa menanggung biaya kesehatan yang tinggi.

Keempat, memperkuat program perlindungan sosial sangat penting untuk menangani kemiskinan. Bantuan tunai bersyarat, program pangan, dan dukungan untuk kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, dapat memberikan jaring pengaman yang diperlukan. Program-program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan akan memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat akan merasa lebih memiliki program tersebut dan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam pelaksanaannya.

Dengan mengimplementasikan solusi kebijakan yang berfokus pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung lama dan berakar dari berbagai penyebab yang saling terkait. Ketidakmerataan pembangunan menjadi salah satu aspek utama yang menciptakan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sementara kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya mengalami pertumbuhan yang pesat, banyak daerah terpencil, terutama di wilayah timur, masih terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Hal ini mengakibatkan akses masyarakat di daerah tersebut terhadap infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan menjadi sangat terbatas. Pengangguran juga merupakan faktor signifikan yang memperburuk situasi kemiskinan. Banyak individu yang mencari pekerjaan tidak memiliki keterampilan yang relevan, sehingga mereka kesulitan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar, tetapi bagi banyak keluarga miskin, biaya pendidikan yang tinggi menjadi penghalang utama untuk memberikan anak-anak mereka kesempatan yang lebih baik.

Dampak kemiskinan meluas dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam bidang kesehatan, misalnya, banyak keluarga yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan yang layak. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian dan penyebaran penyakit yang seharusnya dapat dicegah. Selain itu, pendidikan yang buruk di kalangan anak-anak dari keluarga miskin mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi di negara ini. Kemiskinan juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat yang terpinggirkan sering kali dapat memicu konflik dan kerusuhan. Rasa ketidakadilan dan kesenjangan sosial menciptakan ketegangan yang dapat mengganggu keamanan dan

ketertiban, serta menggoyahkan fondasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Najib Putri & Yuliana, 2023).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, diperlukan solusi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua anak, terutama dari keluarga miskin, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan bantuan biaya pendidikan dapat membantu meringankan beban keluarga. Selanjutnya, pengembangan ekonomi berkelanjutan juga sangat penting. Pemerintah perlu menciptakan program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan potensi lokal. Selain itu, reformasi dalam pelayanan kesehatan harus dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tersedia bagi seluruh masyarakat.

Program perlindungan sosial juga perlu diperkuat. Bantuan tunai bersyarat dan program dukungan untuk kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, dapat memberikan jaring pengaman yang dibutuhkan. Dengan memberikan dukungan ini, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan komunitas dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab, sehingga meningkatkan efektivitas dari setiap program yang dijalankan. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Dengan langkah-langkah strategis yang diambil secara bersamaan, kita dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Akhirnya, tujuan kita adalah agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat, dengan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Daftar Pustaka

- Arfiani, D. (2020). Berantas kemiskinan.
- Khomsan, A., Dharmawan, A. H., Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). Indikator kemiskinan dan misklasifikasi orang miskin. Atas kerja sama antara fakultas ekologi manusia ipb dengan yayasan pustaka obor indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=IDZDDAAQBAJ>
- Najib Putri, R. H., & Yuliana, I. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai mediasi di Probolinggo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(6), 2691–2700. <http://repository.uin-malang.ac.id/15255/>

- Syadullah, M. (2010). Krisis ekonomi global dan dampak fiskal: Kasus Indonesia. Tiara Wacana. <https://books.google.co.id/books?id=i5erYgEACAAJ>
- Zaman, S. (n.d.). Friedrich hayek versus john maynard keynes: Menyelisik perdebatan tentang intervensi pemerintah dalam ekonomi dan mencari solusi atas isu kemiskinan di indonesia. <http://repository.uin-malang.ac.id/16855/>
- Zuhroh, N. (2009). Positioning pendidikan ips dalam mengentaskan kemiskinan sosial, madrasah: Jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar. 49–80. <http://repository.uin-malang.ac.id/8928/1/8928.pdf>